

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (pemilu) berasal dari konsep atau gagasan besar demokrasi, yang berarti acuan John Locke dan Rousseau, yang menjamin kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi individu di segala bidang.¹ Dalam demokrasi ada partisipasi nilai dan kedaulatan harus dijunjung tinggi di tingkat legislatif, yudikatif, dan eksekutif oleh warga negara dan lembaga negara. Hubungan antara warga negara dan negara, meskipun berjauhan, difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat, dan semua pihak dapat bebas untuk aktif berpartisipasi dan menjadi bagian dari proses demokrasi, meskipun pada hakikatnya partisipasi mereka masih cenderung prosedural dan dinamis.

Pemilu adalah tempat demokrasi dimana orang dapat terhubung dengan negara. Pemilihan umum ialah salah satu bagian proses dimana kepentingan politik diperjuangkan demi lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam bentuk proses pemilu dalam rangka mewujudkan demokrasi. Pemilu telah menjadi rangkaian kegiatan politik untuk memenuhi kepentingan rakyat, yang pada gilirannya membentuk berbagai bentuk kebijakan. UUD 1945 menetapkan bahwa hak pilih universal merupakan wadah demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara

¹ Bachtiar di dalam Sarief Saefulloh, Oekan S. Abdoellah, Mudiwati R. *“Integrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019”*. Jurnal Civic Hukum. Vol, 5 No 1. (2020). 97-110.

dimana rakyat adalah yang tertinggi dan wakil-wakilnya. Kekuasaan melalui pemilu merupakan kekuasaan yang muncul dari bawah ke atas sesuai dengan kehendak rakyat dan digunakan sesuai dengan kehendak rakyat.

Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 1955 sampai sekarang telah diadakan sebanyak 12 kali yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilihan umum dilaksanakan pada setiap lima tahun sekali sesuai dengan Pasal 167 angka (1) Undang-Undang No.07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang ini juga mengatur diselenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk menjadi pemenang dalam Pemilihan Umum setidaknya pasangan calon harus mencapai kemenangan suara sah pemilih sesuai ketentuan yang telah diatur pada Pasal 416 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”. Maka dari itu diperlukan suatu strategi politik oleh setiap pasangan calon agar mendapat dukungan suara dari para pemilik suara yang sah.

Strategi politik merupakan strategi yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita politik.² Menurut Clausewiter dalam Nussar Schroeder, strategi adalah pengetahuan menggunakan pertempuran untuk menggapai kemenangan perang. Pada pengertian umum, strategi merupakan cara untuk memenangkan atau untuk mencapai suatu tujuan, seperti halnya strategi kampanye. Strategi kampanye ialah suatu wujud khusus dari strategi politik yang bertujuan untuk menggapai kekuasaan dan pengaruh yang sebesar-besarnya dengan cara melakukan pemilihan dengan baik dalam rangka mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat membawa perubahan sosial.³

Dalam pemilihan umum strategi politik tentunya mempengaruhi pelaksanaan dalam kampanye yang bakal dilakukan oleh para calon yang berdampak pada hasil suara yang didapat. Politik identitas dapat diartikan sebagai strategi dan perebutan simbol-simbol budaya primitif (agama, ras, suku, golongan) untuk siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.⁴ Bagi Agnes Heller, politik identitas secara sederhana dapat dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya. Menurutnya politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, namun di lain pihak, politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan verbal-fisik, dan juga pertentangan etnik dalam kehidupan.

² Peter Schröder, *Strategi Politik*. Jakarta: Frederich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, 2003, hlm 5

³ *Ibid*, hal 29

⁴ Syafuan Rozi, dkk, *Politik Identitas Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali, dan Papua*, Bumi Aksara Jakarta, 2019, Hal 1

Menurut Jeffrey Week politik identitas melibatkan kepemilikan banyak orang dan perbedaan satu orang dengan orang lain.⁵ Perspektif Jeffrey Week menegaskan pentingnya identitas bagi setiap individu dan kelompok atau komunitas. Politik identitas dinyatakan mampu merepresentasikan manusia dengan menggambarkan individu terhadap orang lain. Dengan demikian, politik identitas dianggap universal dan bagian dari politik budaya. Di Indonesia sendiri, politik identitas adalah tentang ras, suku, agama, ideologi dan kepentingan lokal, isu-isu yang sering diwakili oleh elit dan bagaimana mereka diekspresikan.

Sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan berupa penyelenggaraan Pemilihan Umum secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu selanjutnya. Pada tahun 2019 telah terselenggara pemilu serentak yang merupakan pemilu serentak pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Pada pemilihan umum serentak yang diselenggarakan pada bulan April tahun 2019, telah terlaksana pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Pada pemilihan legislatif atau yang disingkat pileg, telah terpilih wakil-wakil yang akan mewakili suara rakyat di Senayan untuk periode 2019-2024. Meskipun pemilu telah selesai diselenggarakan, namun banyak terdapat persoalan-persoalan yang menarik untuk ditinjau, baik dari segi penyelenggaraannya maupun dari segi hasil yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau disingkat dengan KPU selaku lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

⁵Cin Pratipa Hapsarin, *Politik Identitas: Geliat Sosial Antara Aku dan Yang Lain*, http://www.academia.edu/4654898/politik_identitas, diakses pada tanggal 22 februari 2021

Pasal 222 angka (2) undang-undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya", maka karena itu didapatkan dua pasangan yaitu:

1. Joko Widodo - Ma'ruf Amin
2. Prabowo Subianto - Sandiaga Uno

Pada hasil suara pemilihan presiden, calon nomor urut 01 yaitu Joko Widodo - Ma'ruf Amin berhasil mengalahkan calon nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan persentase penerimaan suara sebanyak 55,5% sedangkan Prabowo hanya mendapati suara sebesar 44,5%. Dengan hasil suara tersebut dapat dilihat bahwasanya pasangan nomor urut 01 menang di berbagai daerah Indonesia. Tapi terdapat di salah satu daerah yaitu Provinsi Sumatera Barat pasangan dengan nomor urut 01 mengalami kalah telak, dengan hasil suara yaitu hanya sebesar 14,08% ini berbanding terbalik dengan pasangan calon nomor urut 02 yaitu sebesar 85,92%. Hal ini sejalan dengan daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat dengan hasil perolehan suara yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 02. Berikut ini tabel hasil perhitungan suara di Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 1.1
Jumlah Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Sumatera Barat

No	Nama Calon	Jumlah Suara
1	Joko Widodo-Ma'ruf Amin	14.08%
2	Prabowo Subianto-Sandiaga Uno	85.92%

Sumber: www.kpu.co.id

Namun, di salah satu daerah Sumatera Barat yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai pasangan nomor urut 01 berhasil mendapatkan suara lebih banyak dari pasangan nomor 02. Berikut ini tabel hasil perhitungan suara di Kabupaten Kepulauan Mentawai:

Tabel 1.2
Jumlah Suara Pemilihan Presiden di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Nama Calon	Jumlah Suara
1	Joko Widodo - ma'ruf amin	40.978 (81,65%)
2	Prabowo Subianto-Sandiaga Uno	9.210 (18,35%)

Sumber: www.kpu.co.id

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya calon nomor urut 01 mendapati kemenangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan persentase 81,65% yang berhasil mengalahkan calon nomor urut 02 dengan telak. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwasanya di Sumatera Barat pasangan dengan nomor urut 02 mengalami kemenangan. Hal ini tidak dapat dipungkiri jika rata-rata di daerah Sumatera Barat para pemilih cenderung untuk memilih pasangan calon urut 02, ini didasari bahwa Sumatera Barat sendiri merupakan lumbung suara partai Gerindra.

Peneliti disini tertarik untuk menganalisis identitas politik yang menyebabkan kemenangan Joko Widodo dan pasangannya Ma'ruf Amin pada

Pemilu Presiden tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini dikarenakan melihat pencapaian PDIP di Kepulauan Mentawai, tidak heran bila pada akhir Maret 2019 berbagai relawan dan simpatisan Jokowi-Ma'ruf menyatakan bahwa salah satu target mereka ialah Joko Widodo - Ma'ruf memperoleh 90% suara di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pilpres 2019. Tirtoid dalam beritanya yang dikutip dari Antara bahwa Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Maruf Amin, Tombang Hutagalung menyatakan bahwa Jokowi sudah terbukti bekerja, hasil kerja Pak Jokowi untuk membangun Mentawai salah satunya jalan trans Mentawai, dan sudah dinikmati masyarakat Mentawai, jadi kerjanya itu nyata bukan sekedar berjanji lagi. Selanjutnya, meski demikian, Joko Widodo sukses meningkatkan perolehan suaranya sebab pada 2014 ia mendapat hanya 77,65 suara di Mentawai. Hasil itu juga menjadikan Mentawai sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Sumbar di mana suara Joko Widodo di 2019 lebih besar daripada 2014.⁶

Peneliti mencoba untuk mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu tentang politik identitas. Pada sebelumnya peneliti membahas sedikit politik identitas karena pada dasarnya penelitian ini akan membahas faktor kemenangan seorang calon dalam Pemilu dengan perspektif politik identitas. Akan tetapi penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda-beda seperti penelitian yang dilakukan oleh Yoggi Alvi Hamdani,⁷ skripsi yang berjudul Politik Identitas

⁶ Dikutip dari www.Tirtoid di akses pada tanggal 20 Oktober 2020

⁷ Yoggi Alvi Hamdani, "Politik Identitas Masyarakat Multi-etnis Kota Sawahlunto Dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018", Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik FISIP UNAND, Padang, 2020. diakses pada tanggal 18 februari 2021

Masyarakat Multi Etnis Kota Sawahlunto Dalam Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada untuk walikota dan wakil walikota pada tahun 2018 di Kota Sawahlunto menjadi ulsan ketika politik identitas etnis menjadi pengaruh tersendiri atau tidak pada masyarakat dalam menentukan pilihan politik mereka. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Alexsander Yandra⁸ dengan judul Politik Etnisitas Dalam Pemilukada (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Pasaman Provinsi Sumatera Barat). Yang menjadi objek penelitiannya kekisruhan Pilkada tahun 2010 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman yang mengakibatkan persaingan antar calon kandidat serta menguatnya afeksi keetnisan dan daerah antara etnis Minang dengan Mandahiling Batak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irfan Zharfandy⁹ skripsi yang berjudul Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013. Dengan tujuan penelitian untuk mengkaji dominasi identitas terhadap pemilihan pasangan calon pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan objek yang bakal diteliti.

⁸ Alexander yandra, Jurnal Academia “*Politik Etnisitas Dalam Pemilukada (Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Di Pasaman Provinsi Sumatera Barat)*” diakses pada tanggal 18 februari 2021

⁹ Irfan Zharfandy, “*Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013*”, Skripsi Tahun 2016 diakses pada tanggal 18 februari 2021

1.2 Rumusan Masalah

Pemilu serentak yang telah dilaksanakan pada 17 april 2019 lalu, merupakan pemilu serentak pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Pada pemilihan umum serentak yang diselenggarakan pada bulan April tahun 2019, telah terlaksana pemilihan anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden. Ada dua calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung dalam pesta demokrasi ini. Dalam pemilihan Presiden tersebut berhasil dimenangkan oleh pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang diusung oleh partai dengan memperoleh suara 55,32% sedangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara sekitar 44,68% suara. Hasil suara tersebut merupakan hasil dari hitungan suara tingkat nasional sedangkan di Sumatera Barat sendiri pasangan nomor urut 02 mendapati perolehan suara yang tinggi. Hal ini dikarenakan Sumatera Barat merupakan lumbung suara dari Partai Gerindra yang notabene partai pengusung pasangan nomor urut 02 dengan perolehan suara 85.92%.

Salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, pasangan nomor urut 02 mengalami kekalahan dengan perolehan suara sekitar 18,35% sedangkan pasangan nomor urut 01 mendapati hasil perolehan suara tinggi sekitar 81,65%. Perbandingan yang sangat signifikan antara hasil pemilu provinsi dengan hasil pemilu kabupaten inilah yang menjadi fokus masalah peneliti.

Cara supaya memenangkan pemilihan pada saat pemilu, biasanya berbagai strategi politik digunakan untuk meraup suara pemilih. Politik identitas merupakan

suatu bentuk strategi politik yang digunakan oleh kandidat pada saat pemilu, dengan membangun isu-isu mengenai identitas seperti daerah, ras, agama, ideologi, suku.

Saat ini telah banyak kandidat dalam suatu pemilihan membangun isu politik identitas untuk meraup keuntungan berupa perolehan suara. Di Mentawai sendiri teridentifikasi salah satu pasangan calon menggunakan politik identitas sebagai isu yang dibangun untuk meraup keuntungan. Dampak yang signifikan dapat dilihat dengan kekuatan Partai PDIP di Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta kampanye politik yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yuddas Sabaggalet yang secara terbuka mendukung Joko Widodo – Ma'ruf Amin untuk menang di pemilihan Mentawai dimana Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut merupakan kader Partai PDIP.

Portal berita online yang dikutip dari Antara bahwa Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Maruf, Tombang Hutagalung menyatakan bahwa¹⁰

..Jokowi sudah terbukti bekerja, hasil kerja Pak Jokowi untuk membangun mentawai salah satunya jalan trans Mentawai, dan sudah dinikmati masyarakat Mentawai, jadi kerjanya itu nyata bukan sekedar berjanji lagi. Selanjutnya, meski demikian, Jokowi sukses meningkatkan perolehan suaranya sebab pada 2014 ia mendapat hanya 77,65 suara di Mentawai. Hasil itu juga menjadikan Mentawai sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Sumbar di mana suara Jokowi di 2019 lebih besar daripada 2014.

Kemenangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin di kabupaten Mentawai menurut asumsi peneliti disebabkan politik identitas yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Politik identitas merupakan alat perjuangan politik suatu etnis untuk

¹⁰ Dilihat di Tirto.id

mencapai tujuan tertentu. Castells juga mengatakan bahwa politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial¹¹. Hal ini sejalan dengan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang multi-etnis tetapi didominasi oleh etnis Mentawai. Peran etnis dalam pemilihan memiliki pengaruh dan sudah menjadi bagian dalam politik identitas. Etnis juga menjadi satu hal yang berpengaruh terhadap kandidat untuk mencari masa untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, karena etnis merupakan satu kekuatan penting dalam mencapai kekuasaan.

Sejalan dengan hal tersebut dalam sebuah portal berita online MinangSatu dikutip salah satu opini dari ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Eki Butman dengan opini sebagai berikut.¹²

..Pada Pemilu serentak 2019 aroma pertarungan Pilpres seakan menenggelamkan pesta para kontestan calon Legislatif. Bukan mengecilkan nuansa perebutan kursi Legislatif, namun dengan hanya dua kandidat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seolah memperjelas siapa kawan dan siapa lawan. Pertarungan kelompok 01 dengan kelompok 02 nyaris membawa ke arah politik identitas dalam mencitrakan diri, dan ini nyaris membuat konflik serta perpecahan di tengah-tengah masyarakat tambah data yang dimaksudkan tentang politik identitas.

Berdasarkan opini tersebut Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyinggung politik identitas dalam mencitrakan diri. Hal tersebut yang membuat

¹¹ Castells, Manuel, 2010. *"The Power of Identity"*, Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, h134.

¹² "Pemilu Mentawai Dalam Balutan Persaudaraan" Berita Online dilihat di MinangSatu.com.

peneliti yakin bahwa kemenangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin dipengaruhi oleh politik identitas yang dilakukan oleh partai maupun partisipan. Pada opini tersebut dikatakan nyaris membawa kearah politik identitas, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwasanya politik identitas memang terjadi di sana.

Penelitian ini hal yang menjadi daya tarik peneliti adalah kemenangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin pada Pilpres tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana peneliti melihat adanya strategi politik yang digunakan oleh kandidat dengan membangun isu mengenai politik identitas. Penelitian ini hanya berfokus kepada politik identitas yang dilakukan oleh pasangan calon Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Keadaan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang nantinya dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah dengan judul "Politik Identitas dalam Kemenangan Joko Widodo pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai". Permasalahan di atas dituangkan dalam suatu pertanyaan penelitian yaitu "Bagaimana Politik Identitas Menyebabkan Kemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai".

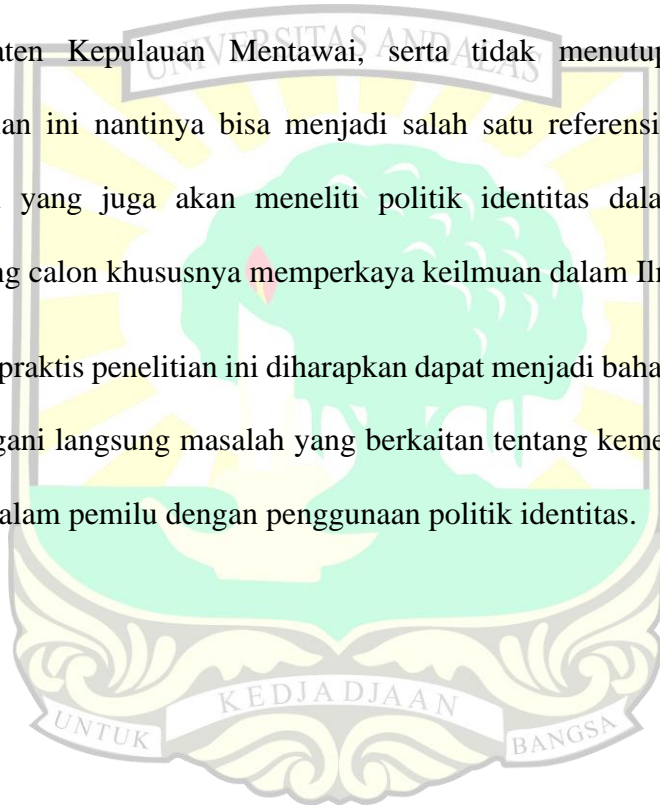
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang maupun rumusan masalah yang telah peneliti jabarkan sebelumnya maka hal yang akan menjadi tujuan penelitian adalah menganalisis politik identitas yang menyebabkan kemenangan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan politik, serta lebih memperkuat teori penelitian yang ada.

1. Secara teoritis penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan penggunaan strategi politik identitas dalam pemilu Presiden 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta tidak menutup kemungkinan penelitian ini nantinya bisa menjadi salah satu referensi tambahan bagi peneliti yang juga akan meneliti politik identitas dalam kemenangan seorang calon khususnya memperkaya keilmuan dalam Ilmu Politik.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang menangan langsung masalah yang berkaitan tentang kemenangan seorang calon dalam pemilu dengan penggunaan politik identitas.



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Secara universal tinjauan pustaka adalah kerangka konseptual dalam suatu penulisan, dasar pijakan dari sisi kajian teori. Tinjauan pustaka ini dibuat secara lengkap yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami seluruh bagian penulisan secara konsep dan teoritis.

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan sebelumnya dilakukan oleh Yoggi Alvi Hamdani (2020) tentang “Politik Identitas Masyarakat Multietnis Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto 2018”.¹³ Penelitian yang dilakukan Yoggi menunjukkan bahwa ketika politik identitas rasial terlibat dalam pilihan politik masyarakat, pelaksanaan pilkada di Kota Sawahlunto pada 2018 dapat dilihat sebagai gambaran tersendiri. Dalam penelitian ini, Yoggi menggunakan metode kualitatif dan deskriptif analitik untuk mengkaji masalah tersebut. Penelitian ini mengadopsi teori gerakan politik etnis Klaus von Beyme. Penelitian ini menemukan bahwa kesamaan ras yang dimiliki Ismed dan Masyarakat Tanah Lapang tidak berpengaruh terhadap suara Ali Yusuf di Kelurahan Tanah Lapang. Pada tahun 2018, khususnya di Kelurahan Tanah

¹³ Yoggi Alvi Hamdani, “*Politik Identitas Masyarakat Multietnis Kota Sawahlunto Dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018*”, Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik FISIP UNAND, Padang, 2020. diakses pada tanggal 18 februari 2021.

Lapang, serangkaian politik identitas dari kelompok masyarakat tidak terpicu. Sebuah gerakan yang menggunakan pengenal rasial untuk mengkomunikasikan pesan politiknya telah menyebabkan ketegangan antara anggota masyarakat. Dalam pemilihan wali kota Sawahlunto 2018, masyarakat multietnis Kota Sawahlunto pada proses kampanyenya tidak terdapat pasangan calon menggunakan isu atau wacana etnis atau kesukuan untuk berkampanye.

Penelitian kedua oleh Alexsander Yandra berjudul "Politik Etnisitas Dalam Pemilukada "(Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Pasaman, Provinsi Sumatera Barat)".¹⁴ Menurut penelitian Alexsander, gejolak pilkada 2010 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasaman telah menyebabkan persaingan antar calon dan etnis serta sensitivitas daerah antara masyarakat Minangkabau dan Mandailing Batak. Dikatakan bahwa itu menyebabkan peningkatan kecenderungan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan kelompok tertentu (Tim Sukses) yang telah membantu menciptakan primordial sebagai basis dukungan yang kuat, dan yang mempertahankan jumlah pemilih yang meluas. Wacana etnis secara oposisional bagaikan "aku-kamu", "kami dan mereka" di pihak tim berhasil menghasilkan perselisihan dalam interaksi kelompok etnis Minang dan Mandailing, terutama pada tahap pemilihan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilkada di Pasaman menjadikan etnisitas sebagai dasar penentuan pasangan calon, menyebabkan mobilisasi pembagian etnis antara Mandailing dan Minang dalam memberikan dukungan politik, gerakan politik

¹⁴ Alexsander yandra , Jurnal Academia "*Politik Etnisitas Dalam Pemilukada (Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Di Pasaman Provinsi Sumatera Barat)*" diakses pada tanggal 18 februari 2021

berdasarkan etnisitas menjadi penggerak untuk mempengaruhi masyarakat dan berbagai bentuk atribut etnis dan bahasa ras menjadi alat untuk berkampanye sehingga menyebabkan kekacauan.

Penelitian yang terakhir dilakukan Irfan Zharfandy dengan judul “Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013”.¹⁵ Mengkaji peran politik identitas dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah pemilihan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh identitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melihat data deskriptif dari studi literatur dan wawancara dengan pengamat, praktisi, dan peneliti di bidangnya. Landasan teoritis dari penelitian ini adalah teori politik identitas oleh Manuel Castells, teori elit politik oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, dan teori hubungan patron-klien oleh James C. Scott. Penulis menggunakan teori ini untuk menunjukkan bahwa identitas etnis memainkan peran yang berpengaruh dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2013. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif menggunakan teori ini, ditunjukkan bahwa perkembangan politik identitas disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: pertama, tingkatan masyarakat, kedua, polarisasi politik dari pihak elit lokal, ketiga, peraturan negara atau regulasi pemerintah (kebijakan desentralisasi dan pemilu).

¹⁵ Irfan Zharfandy, “*Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013*”, Skripsi Tahun 2016 diakses pada tanggal 18 februari 2021

Untuk mengetahui perbandingan penelitian maka dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Teori	Hasil
1	Yoggi Alvi Hamdani (2020). Politik Identitas Masyarakat Multietnis Kota Sawahlunto dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018	Metode kualitatif deskriptif analitis / teori gerakan politik etnis oleh Klause Van Beyme.	Penelitian ini menemukan bahwa kesamaan etnis Ismed dan Ali Yusuf tidak serta merta membuatnya populer di Kelurahan Tanah Lapang. Itu sebabnya pelaksanaan Pilkada Sawahlunto 2018 berjalan lancar di Kelurahan Tanah Lapang, tanpa adanya kelompok masyarakat yang terbentuk di sekitar identitas mereka. Gerakan menggunakan atribut rasial sebagai media komunikasi politik telah menciptakan ketegangan politik di tingkat masyarakat. Pemilihan wali kota Sawahlunto 2018 tidak ada terdapat pasangan calon pada selama kampanye,

			menggunakan masalah etnis atau suku.
2	Alexsander Yandra / Politik Etnisitas Dalam Pemilukada (Studi kasus dalam pelaksanaan pemilukada bupati dan wakil bupati di Pasaman Provinsi Sumatera Barat)	Eksploratif dengan pendekatan kualitatif / Teori politik identitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilkada di Pasaman menjadikan etnisitas sebagai dasar penentuan pasangan calon, menyebabkan mobilisasi pembagian etnis antara Mandailing dan Minang dalam memberikan dukungan politik, gerakan politik berdasarkan etnisitas menjadi penggerak untuk mempengaruhi masyarakat dan berbagai bentuk atribut etnis dan bahasa ras menjadi alat untuk berkampanye sehingga menyebabkan kekacauan.
3	Irfan Zharfandy / Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013	Kualitatif deskriptif / Teori politik identitas dari Manuel Castells, teori elite politik dari Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, dan teori hubungan patron-klien dari James C. Scott.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan politik identitas masih disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama adalah tingkatan masyarakat, yang kedua adalah polarisasi politik oleh elit lokal, dan yang

ketiga adalah pemilihan umum.

- 4 Fikri Farhad Farid / Kualitatif studi kasus
Politik Identitas Dalam instrumen / teori
Kemenangan Joko politik identitas
Widodo Pada Pemilu
2019 di Kabupaten
Kepulauan Mentawai.
-

Sumber : diolah oleh peneliti Tahun 2022

Berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian yang peneliti kerjakan adalah politik identitas dalam kemenangan Joko Widodo pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus instrumen, yang menggambarkan secara gamblang bagaimana langkah-langkah atau strategi penting yang diambil partai pengusung Joko Widodo. Kontras antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian, hipotesis, dan objek penelitian.

Kajian yang dilakukan oleh Yoggi, dimana penelitian tersebut berlokasi di kota Sawahlunto dan mengkaji masyarakat multietnis di Kota Sawahlunto lebih mendalam dan konstruktif sifatnya. Karena, mengingat daerah setempat melihat cara hidup etnis karena suatu siklus sosial yang erat. Kajian ini melihat apakah ada pengaruh isu politik identitas yang berdasarkan etnis dalam pelaksanaan pilihan kepala daerah untuk Kota Sawahlunto tahun 2018, khususnya di Kelurahan Tanah Lapang.

Objek yang menjadi fokus penelitian ini adalah pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dari Partai PDI-P tahun 2019 bernama Joko Widodo - Ma'ruf

Amin. Hal ini unik dalam kaitannya dengan kajian yang dilakukan oleh Yoggi dengan melihat isu politik etnis menjadi kuat atau tidak dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Sawahlunto, khususnya di Kelurahan Tanah Lapang. Upaya kampanye yang dilakukan dengan penggunaan atribut etnis sebagai wadah komunikasi politik, dan membuat semacam tekanan politik di tingkat lokal. Selain itu, penelitian yang dikaji oleh Aleksander Yandra yaitu meneliti tentang persaingan antar kandidat calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pasaman yang menyebabkan pergelutan di antara kandidat. Serta mengakibatkan afeksi keetnisan dan kewilayahan antar etnis Minang dan Mandailing Batak.

Irfan Zharfandy menilik dampak isu pengaruh politik identitas terhadap pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, dengan titik fokus kajiannya pada faktor dan peran elit etnis Bugis dan Makassar yang merupakan kelompok etnis dominan di Sulawesi Selatan. Sedangkan fokus kajian yang dilakukan peneliti adalah pengaruh politik identitas dalam kemenangan pasangan calon 01 yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin 2019 pada pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.2 Tinjauan Teoritis

Permasalahan perlu diidentifikasi dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan beberapa konsep untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan. Konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.2.1 Konsep Pemilihan Umum

Ibnu Tricahyono mencirikan pemilihan umum dengan perspektif teoritis dan filosofis. Ia mengungkapkan bahwa pemilihan umum adalah instrumen untuk memahami pengaruh masyarakat yang berharap untuk membentuk pemerintahan yang absah serta metode untuk mengartikulasikan keinginan dan kepentingan masyarakat.¹⁶

Pelaksanaan pada pemilihan umum, KPU sebagai penyelenggara memberikan aturan kepada setiap kandidat waktu untuk melakukan kampanye politik untuk mempromosikan visi-misi, program kerja, dengan tujuan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dari pemilih. Dalam kampanye berbagai strategi digunakan seperti salah satunya terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dimana tim pemenangan Joko Widodo – Ma'ruf amin mencoba untuk membangun isu politik identitas.

2.2.2 Konsep Politik Identitas

Konsep ini adalah kekhasan lain dalam ilmu politik. Politik identitas merupakan satu nama untuk biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik menyatukan dirinya sehubungan dengan kontras yang muncul dari kontras dalam tubuh. Dalam cara berpikir, pembicaraan ini telah lama muncul, namun penerapannya dalam penyelidikan ilmu politik mencapai tahap penting setelah

¹⁶ Muhammad Labolo, *Partai Politik dan sistem Pemilu di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm 46

diskusi di pertemuan asosiasi ilmuwan politik internasional di Wina pada tahun 1994.¹⁷

Identitas seperti yang ditunjukkan oleh Jeffrey Week dalam Hapsarin terhubung dengan memiliki tempat tentang kemiripan dengan berbagai individu dan apa yang membedakan individu dari yang lain. Sudut pandang Jeffrey Week menggarisbawahi pentingnya identitas bagi setiap orang juga sehubungan dengan individu atau komunitas.¹⁸ Meskipun demikian, ini akan benar-benar lebih mudah jika kita mengetahui gagasan identitas ini sebagai ilustrasi spesifik. Pada titik ketika seorang individu dilahirkan, ia tidak diragukan lagi akan mendapatkan identitas yang bersifat fisik dan selanjutnya non-fisik. Identitas fisik sebenarnya yang paling banyak diklaim adalah apakah dia laki-laki atau perempuan. Sementara itu, identitas non-fisik adalah nama yang digunakan, serta status yang ada dalam keluarga pada saat kelahiran. Identitas dalam isu-isu sosiologi serta politik biasanya disusun menjadi dua kelas utama, yaitu identitas sosial (kelas, ras, rasial, orientasi, dan seksualitas) dan identitas politik. Identitas sosial menentukan tempat subjek dalam hubungan atau koneksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan tempat subjek secara lokal melalui perasaan atas rasa kepemilikan dan sekaligus menunjukkan tempat subjek yang berbeda dalam suatu perbedaan.¹⁹

¹⁷ John T. Ishiyama. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu*. Penerjemah Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), h. 362

¹⁸ Cin Pratipa Hapsarin, *Politik Identitas: Geliat Sosial Antara Aku dan Yang Lain*, http://www.academia.edu/4654898/politik_identitas, diakses pada tanggal 22 februari 2021

¹⁹ Setyaningrum, Arie. *Jurnal Mandatory Politik Perlawanan: Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam Wacana Politik Poskolonial*. Yogyakarta

Identitas politik berbeda dengan politik identitas, secara konseptual identitas politik adalah perkembangan yang menentukan tempat keunggulan subjek dalam ikatan wilayah kelompok politik. Sedangkan gagasan tentang politik identitas mengacu pada komponen politik untuk memilah identitas sebagai aset politik dan sarana politik.²⁰

Secara lugas, apa yang tersirat dari identitas dicirikan sebagai kualitas dasar yang menjadi alasan pengakuan akan sesuatu. Identitas adalah karakteristik khusus dari setiap individu atau komunitas yang menjadi bagian yang mengarahkan orang lain atau jaringan lain untuk mengenalkan mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh Stuart Hall, identitas seseorang tidak bisa dilepaskan dari “rasa” dengan ikatan kolektivitas.

Mengingat penegasan tersebut, ketika identitas direncanakan sebagai sesuatu yang menyebabkan seseorang memiliki kemiripan yang sama dengan orang lain. Maka secara bersamaan identitas juga menggambarkan keberbedaan atau sesuatu di luar kesamaan tersebut. Dengan tujuan bahwa kualitas identitas dibentuk bukan hanya oleh ikatan kolektif, tetapi juga dengan kategori pembeda.²¹

Identitas selalu terhubung dengan setiap orang dan khalayak, identitas adalah ciri yang menjadi pembeda satu individu dari individu yang lain sehingga individu tersebut dapat dibedakan dengan individu lainnya. Identitas adalah kontras antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Identitas mencerminkan identitas individu, dan dapat menentukan situasi individu. Masalah politik identitas dapat

²⁰ *Ibid* h 19

²¹ Setyaningrum. *Ibid* h 26

dikatakan terjadi di setiap perkumpulan atau daerah, setiap orang yang memiliki kepribadian individu yang unik dalam kaitannya dengan suku, etnis dan agama telah menyatu menjadi satu khalayak atau komunitas yang memiliki identitas kolektif.

Menurut Cressida Heyes dalam Ubed (2002:16), isu-isu politik identitas dicirikan sebagai indikasi tindakan politik dari perspektif yang lebih luas dan hipotesis pertemuan ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok sosial tertentu. Berbeda dengan koordinasi diri dalam lingkup sistem kepercayaan (ideologi) atau afiliasi kepartaian, politik identitas memiliki kepentingan atas kebebasan keadaan yang keterpinggiran dan mencakup keanggotaan dari kelompok dalam kedudukan lebih luas. Untuk hal ini, Cressida Heyes beranggapan isu politik identitas lebih dipusatkan pada kepentingan orang-orang atau kelompok-kelompok yang keterpinggiran dari pada pengorganisasian. Agnes Heller dalam Ubed (2002:16) mengartikan isu-isu politik identitas sebagai ide dan perkembangan politik yang titik fokusnya adalah pada pembedaan sebagai kelas politik yang signifikan.²²

Setiap komunitas yang ada di dalam masyarakat, meskipun mereka memiliki filosofi dan tujuan yang sama, tidak dapat dipungkiri bahwa ada berbagai jenis individu yang memiliki karakter dan identitas masing-masing. Hal ini karena watak dan identitas individu itu unik dan berbeda, maka sangat mungkin terjadi kontrol antara individu yang sama-sama memiliki ego dan tujuan individu. Hal ini

²² Abdilah S, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Yayasan Indonesiatara. Magelang. h 16

menyebabkan terjadinya perubahan kepentingan yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan kontestasi untuk mendapatkan situasi yang esensial bagi setiap individu dalam komunitas tersebut. Menurut Richard Jenkins, identitas adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Secara eksklusif dengan mengenali identitas berbagai komunitas mungkin seseorang pada suatu saat mengklasifikasikan komunitas tersebut kepada orang lain. Identitas pada mulanya tercipta karena siklus klasifikasi, mengingat kesamaan dan kontras setiap objek ketika dilakukan dalam lingkungan sosial, kemudian, pada saat itu, jalannya tatanan sosial (pengumpulan individu berdasarkan elemen-elemen yang dimiliki bersama oleh sebuah komunitas individu) akan terjadi dalam situasi yang subjek.²³

Identitas dibentuk dari dua elemen, untuk lebih spesifiknya: pertama, elemen internal yang menguraikan pendapat kita tentang identitas kita sendiri dan kedua, elemen eksternal yang menguraikan bagaimana orang lain melihat kita dan menanggapi realitas kita. Mungkin ada tanggapan sebagai penolakan, pembiaran atau dukungan dan memperkuat perspektif identitas luar tentang identitas diri. Jadi semua hal dipertimbangkan, identitas itu muncul dari hubungan kita dengan orang lain. Identitas terbentuk karena adanya ketergantungan dalam hubungan argumentatif antara unsur-unsur internal dan eksternal yang berkolaborasi untuk membentuk suatu identitas.²⁴

Jalannya perkembangan identitas merupakan interaksi yang berjalan secara sosial, dan identitas menjadi signifikan bagi individu atau seseorang karena

²³ Irfan Zharfandy, *Op cit* hal 21

²⁴ Haralambos dan Holburn, *Sociology: Theme and Perspectives*, Vol. 5 (London: Colins, 2000), h. 885

identitas memiliki dua fungsi, yaitu untuk menjadi spesifik menentukan batas diri, dan mengartikan realita lingkungan kepada jenis tertentu menurut pandangan individu akan persamaan karakteristik antar elemen lingkungan tersebut. Kedua fungsi identitas tersebut kemudian memungkinkan individu untuk memberikan implikasi, tanggapan, dan reaksi spesifik terhadap keadaan mereka saat ini yang ditunjukkan oleh jenis perilaku yang dipandang siap untuk mengikuti atau memperluas realitas mereka sebagai individu. Ketidakmampuan untuk memutuskan batas-batas diri, dan klasifikasi tambahan yang keliru akan memiliki konsekuensi fatal bagi kemandirian individu.²⁵

Selain itu, identitas juga erat kaitannya dengan kedudukan sosial, khususnya dalam kelompok. Kelompok mengatur individu berdasarkan gelar, pangkat dan individu tidak hanya diperbolehkan untuk memilih situasi mereka sendiri dalam kelompok. Kehadiran identitas menyiratkan bahwa identitas jarang benar-benar cair dan hanya masalah keputusan. Jenkins berpendapat bahwa kehadiran identitas sosial diperoleh dan dialokasikan dalam hubungan kekuasaan. Identitas adalah sesuatu di mana ada perlawanan yang berlanjut dan dengan strategi yang dikembangkan lebih lanjut daripada yang lain. Identitas dapat diketahui dengan berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi ini merupakan cara bagi seorang individu untuk mendapatkan rasa hormat dari identitasnya dan memutuskan apakah seseorang diakui atau tidak dalam suatu kelompok.

²⁵ Irfan Zharfandy, *Op cit* hal 23

Hank Johnston mengungkapkan bahwa identitas dipisahkan menjadi identitas individu dan identitas kolektif yaitu:²⁶

1. Identitas Individu

Individu adalah makhluk otonom dalam dirinya sendiri. Identitas individu berhubungan dengan siapa dan dipersepsikan sebagai apa individu itu di mata publik, terlepas dari ketergantungannya pada orang lain. Saat bergabung dengan komunitas sosial, seorang individu dapat memiliki setidaknya lebih dari satu identitas individu. Identitas ini didapat sejak lahir melalui interaksi dengan orang lain.

2. Identitas Kolektif

Identitas ini muncul karena pergaulan yang terjadi antara orang-orang di dalamnya. Identitas kolektif ditentukan oleh realitas masyarakat dalam menjalin kerjasama dan membangun kedekatan antar sesama. Identitas muncul dan ada dalam sebuah kolaborasi yang dilakukan oleh individu, sesama komunitas, dan lainnya. Kehadiran identitas seseorang akan dirasakan ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Seorang individu membutuhkan cara hidup sebagai penegasan identitasnya. Identitas seseorang memungkinkan dia untuk berada di tempat yang wajar untuk menyelesaikan pekerjaannya di mata publik. Dalam menyampaikan identitasnya, orang membutuhkan gelagat untuk identitasnya. Gelagat ini memberi corak dan nantinya akan membuat individu siap

²⁶ Irfan Zharfandy, *Op cit* hal 24

untuk hidup dan berkolaborasi dengan orang lain sesuai peranannya, sifat identitas utama terlihat secara nyata dan tidak nyata.

Menurut Castells politik identitas adalah kerjasama tunggal dalam aktivitas lingkungan sosial yang diatur oleh kebiasaan individu dan psikologis individu. Identitas adalah siklus perkembangan mendasar dari cara hidup dan psikokultural seseorang yang memberikan makna dan motivasi bagi kehidupan individu, karena keterbentukan identitas adalah proses wacana internal dan interaksi sosial. Kemudian, pada saat itu bagaimana seseorang atau kelompok membangun peningkatan identitas, yang berperan dalam menentukan arah pengembangan identitas dan selanjutnya apa pemanfaatannya, dalam hubungan ini Castells menetapkan bahwa ada tiga jenis terbangunnya identitas:²⁷

1. Identitas legitimasi adalah identitas yang dihadirkan oleh sebuah organisasi atau institusi yang mengatur masyarakat umum untuk mendukung dan melanjutkan kekuatannya terhadap aktor sosial. Misalnya, sebuah organisasi negara yang berupaya membangun identitas bangsa anggota komunitas yang ada di masyarakat pada daerah setempat. Organisasi tersebut pasti telah memperoleh legitimasi untuk melakukan hal itu. Identitas Legitimasi menghasilkan masyarakat sipil, yaitu sekumpulan organisasi dan institusi, serta serangkaian aktor sosial yang terstruktur dan terorganisir yang mereproduksi, meskipun terkadang dengan cara yang bertentangan. Identitas yang merasionalisasi sumber dominasi structural,

²⁷ Castells, Manuel, 2010. *"The Power of Identity"*, Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, hl 8-9.

pernyataan ini mungkin datang sebagai mengejutkan bagi beberapa pembaca, karena masyarakat sipil umumnya menunjukkan konotasi positif dari perubahan sosial yang demokratis. Namun, ini sebenarnya konsepsi asli masyarakat sipil. Sebagaimana dirumuskan oleh Gramsci, bapak intelektual dari konsep ambigu ini. Memang di Gramsci's konsepsi masyarakat sipil dibentuk oleh serangkaian "aparatur" seperti Gereja, serikat pekerja, partai, koperasi, asosiasi sipil, dan seterusnya. Yang di satu sisi memperpanjang dinamika negara tetapi, di sisi lain mengakar kuat di antara orang-orang. Justru identitas ganda masyarakat sipil inilah yang membuatnya menjadi hak istimewa. Medan perubahan politik dengan memungkinkan untuk merebut negara tanpa melancarkan serangan langsung dan kekerasan. Penaklukan negara oleh kekuatan perubahan (katakanlah kekuatan sosialisme, dalam Ideologi Gramsci) yang hadir dalam masyarakat sipil dimungkinkan secara tepat karena kesinambungan antara lembaga masyarakat sipil dan aparatur kekuasaan negara, yang diorganisir di sekitar identitas yang sama (kewarganegaraan, demokrasi, politisasi perubahan sosial, pembatasan kekuasaan pada negara dan konsekuensinya, dan sejenisnya). Di mana Gramsci dan de Tocqueville melihat demokrasi dan kesopanan, Foucault dan Sennett, dan sebelum mereka Horkheimer dan Marcuse lihat dominasi dan legitimasi yang terinternalisasi dari identitas normalisasi yang terlalu dipaksakan, tidak dibedakan.

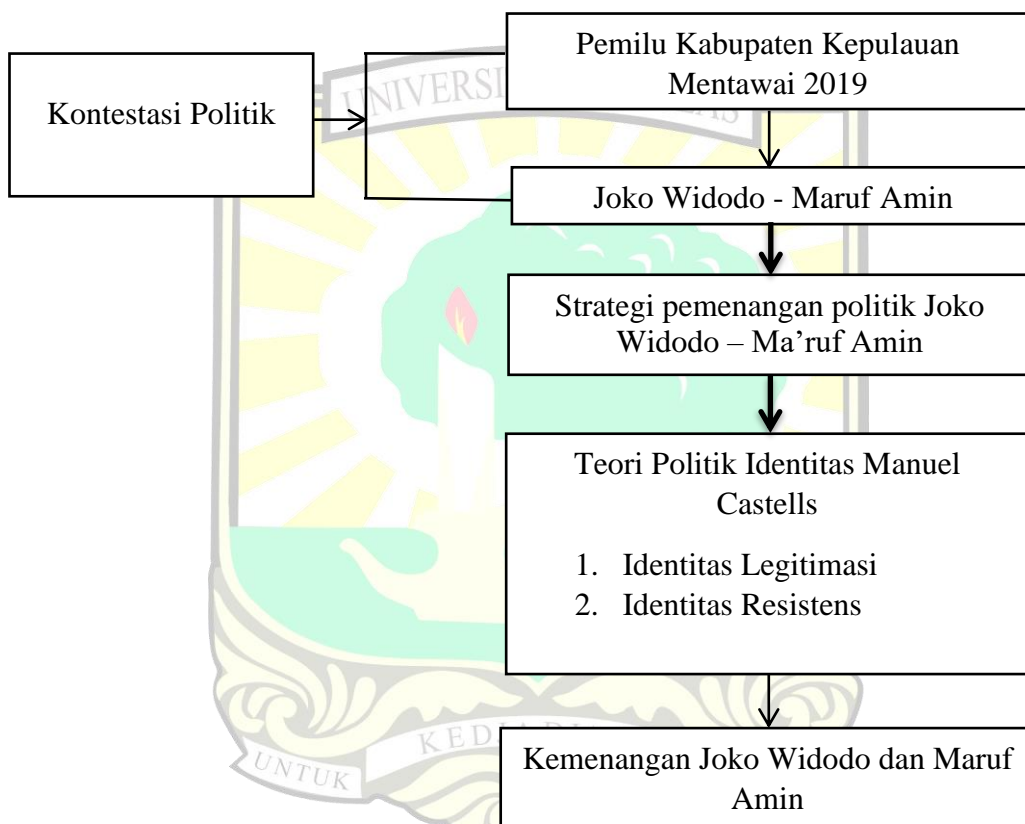
2. Identitas resisten, yang merupakan proses pengembangan identitas oleh aktor sosial dalam komunitas masyarakat sosial yang merasakan tekanan

dari kontrol dan generalisasi oleh kelompok yang berbeda. Sebuah ungkapan yang digunakan ketika Calhoun membedakan munculnya isu-isu politik identitas. Identitas resisten petunjuk untuk pembentukan komune, atau komunitas dalam rumusan Etzioni. Ini mungkin jenis yang paling penting dari pembangunan identitas di masyarakat kita. Ini membangun bentuk perlawanan kolektif terhadap penindasan yang tidak tertahankan, biasanya atas dasar identitas yang tampaknya, jelas ditentukan oleh sejarah, geografi, atau biologi, membuatnya lebih mudah untuk mengesahkan batas-batas perlawanan. Untuk misalnya, nasionalisme berbasis etnis, seperti yang diusulkan Scheff seringkali muncul dari rasa keterasingan di satu sisi dan kebencian terhadap pengecualian yang tidak adil baik politik, ekonomi atau sosial. Fundamentalisme agama, komunitas teritorial, penegasan diri nasionalis, atau bahkan kesombongan mencela diri sendiri, membalikkan istilah wacana yang menindas (seperti dalam “budaya queer” dari beberapa kecenderungan dalam gerakan gay), adalah semua ekspresi dari apa yang disebut pengecualian dari yang dikecualikan. Artinya, pembangunan identitas defensif dalam kerangka institusi/ideologi dominan, membalikkan penilaian nilai sambil memperkuat batas. Dikasuk seperti itu, muncul masalah komunikasi timbal balik antara identitas yang dikecualikan/eksklusif ini. Jawaban atas pertanyaan ini, yang hanya bersifat empiris dan historis, menentukan apakah masyarakat tetap sebagai masyarakat atau terpecah menjadi konstelasi suku, kadang-kadang secara halus berganti nama menjadi komunitas.

3. Identitas proyek adalah identitas di mana aktor sosial menyusun identitas lain yang dapat memutuskan posisi baru di masyarakat serta mengubah konstruksi masyarakat secara umum. Hal ini misalnya, terjadi ketika perkumpulan aktivis perempuan berusaha membingkai identitas lain untuk perempuan, mempertimbangkan kembali tempat perempuan di mata publik, terakhir mengubah konstruksi masyarakat secara menyeluruh dalam meninjau peranan perempuan. Identitas proyek, menghasilkan pengertian seperti yang didefinisikan oleh Alain Touraine yang menyebutkan subjek keinginan menjadi individu, menciptakan pribadi sejarah dan memberi makna pada seluruh alam pengalaman hidup individu. Transformasi individu menjadi hasil subjek dari kombinasi yang diperlukan dari dua afirmasi, pertama afirmasi individu melawan komunitas dan kedua individu melawan pasar. Subjek bukanlah individu, meskipun dibuat oleh dan di dalam individu mereka adalah aktor sosial kolektif yang melaluinya dengan individu untuk mencapai makna holistik dalam pengalaman mereka. Dalam hal ini, pembentukan identitas adalah proyek kehidupan yang berbeda, mungkin atas dasar identitas yang tertindas, tetapi meluas ke arah transformasi masyarakat sebagai perpanjangan dari identitas proyek ini, seperti dalam contoh masyarakat pasca-patriarki di atas, yang membebaskan perempuan, laki-laki, dan anak-anak, melalui realisasi identitas perempuan. Atau, dalam perspektif yang sangat berbeda, rekonsiliasi akhir dari semua manusia sebagai makhluk beriman, bersaudara, di bawah tuntunan Tuhan hukum, baik itu Allah atau Yesus, sebagai akibat dari konversi agama dari

masyarakat yang tidak bertuhan, anti-keluarga, materialis. Jika tidak, tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia dan rancangan Tuhan.

2.3 Skema Pemikiran



Bagan 2.1
Skema Pemikiran

Adapun maksud dari skema pemikiran di atas, adalah upaya memudahkan untuk memahami maksud dan tujuan dari penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini membahas kajian tentang politik identitas dalam kemenangan Joko Widodo pada pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Peneliti melihat fenomena

yang menarik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, bahwasanya pada Pemilu 2019 Joko Widodo mengalami kekalahan telak di Provinsi Sumatera Barat tetapi di Kabupaten Kepulauan Mentawai Joko Widodo mengalami kemenangan telak. Peneliti sendiri mendefinisikan bahwasanya penggunaan wacana politik identitas menyebabkan kemenangan Joko Widodo pada pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode studi kasus instrumental yang bersifat kualitatif, dimana sebagai penguraian masalah masih bermakna tentatif (sementara) dan akan tercipta atau berubah setelah peneliti berada di lokasi penelitian, berbentuk peristiwa/keanehan/indikasi sosial merupakan makna dibalik peristiwa tersebut yang dapat dimanfaatkan sebagai hal yang penting untuk pengembangan konsep dan teori.

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mengarahkan untuk mempresentasikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²⁸ Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana politik identitas menjadi bagian dalam kemenangan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019. Agar fokus penelitian terjawab secara tepat, maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai untuk penelitian ini. Untuk mengapai tujuan yang tertera sebelumnya, peneliti akan memakai pendekatan kualitatif, dimana nantinya akan

²⁸ Hardani, S.Pd.,M.Si.,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, hal 53

memberikan gambaran mengenai makna dan arti yang lebih mendalam pada proses mengungkapkan kejadian yang ada secara mendetail.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena ada yang menarik pada pemilihan umum calon dan calon Wakil Presiden pada tahun 2019 di Sumatera Barat lebih tepatnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Namun, yang menjadi daya tarik pada penelitian ini adalah, pada pemilihan umum Presiden 2019 pasangan urutan no.2 yaitu Prabowo Subianto dan wakilnya Sandiaga Uno mendapat suara telak di sebagian besar daerah di Sumatera Barat sedangkan, pasangan urutan no.1 yaitu merupakan Joko Widodo dan Maruf Amin mendapat kekalahan di sebagian besar daerah Sumatera Barat. Tetapi, salah satu Kabupaten Sumatera Barat yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai pasangan urutan no.2 mengalami kekalahan. Sedangkan, pasangan urutan no.1 mengalami kemenangan telak. Dari hasil tersebut peneliti ingin melihat bagaimana politik identitas menjadi bagian dalam kemenangan tersebut dengan teori politik identitas.

3.3 Peranan Peneliti

Penelitian ini peneliti memiliki peran sebagai alat untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian (*instrument*), penelitian ini

dilakukan secara langsung terjun ke lapangan penelitian untuk mewawancarai beberapa informan dan peneliti terlibat dalam proses pengumpulan informasi atau data. Dalam penelitian ini peneliti juga murni sebagai peneliti dan berada diluar objek penelitian, sehingga peneliti bisa memperoleh informasi dan mengolah data secara objektif guna menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana politik identitas dalam kemenangan Joko Widodo pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Peneliti memiliki peran sebagai *instrument*, maka dalam penelitian ini peneliti harus bersifat responsif, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, mengolah data secepatnya, memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan serta mencari respon yang tidak lazim dan *idiosinkratik*²⁹.

Peneliti mendapatkan izin untuk melakukan penelitian dan turun lapangan dari pembimbing dua Ibu Dewi Anggraini pada tanggal 23 Maret 2021, kemudian beberapa hari selanjutnya pada 26 Maret 2021 peneliti mendapatkan izin turun lapangan dari pembimbing satu Bapak Tamrin untuk turun lapangan. Pada hari itu juga peneliti mengurus perizinan penelitian ke dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan pada hari itu juga surat izin untuk penelitian keluar.

Tanggal 25 April 2021 peneliti berangkat ke lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan menggunakan kapal yang memakan

²⁹ Yang dimaksud dengan idiosinkratik adalah peneliti sebagai instrument memiliki kemampuan pula untuk menggali informasi yang lain dari yang lain, yang semula tidak direncanakan dan tidak diduga-duga terlebih dahulu atau yang tidak lazim terjadi.

waktu satu malam. Pada keesokan harinya pada 26 April 2021 peneliti sampai di lokasi penelitian, selanjutnya peneliti melakukan pencarian terhadap informan yang telah peneliti pilih.

Hari selanjutnya pada 28 April 2021 peneliti bisa memperoleh data, peneliti bertemu dengan kepala Dusun Karoniet yang bernama Berdani dan juga salah satu informan penelitian. Kemudian setelah bercerita sedikit mengenai perjalanan peneliti ke tempat penelitian, peneliti memutuskan untuk melakukan wawancara bersama Bapak Berdani. Setelah mewawancarai Bapak Berdani peneliti diberikan lokasi beserta nama yang bisa peneliti temui untuk diajak wawancara terkait penelitian yang peneliti lakukan.

Tanggal 30 April 2021 peneliti melanjutkan wawancara dengan kepala Dusun Mapadegat Bapak Alexander Saogo yang juga salah satu pengurus Gereja di Dusun Mapadegat. Dengan ditemani oleh Bapak Berdani yang berlokasi di rumah Bapak Alexander Saogo di Dusun Mapadegat, peneliti melakukan wawancara dengan beliau selama kurang lebih satu jam. Pada waktu wawancara dengan Bapak Alexander Saogo peneliti juga dikenalkan dengan tim relawan yang aktif mengkampanyekan pasangan 01 di Desa Tuapejat. Pada saat dikenalkan dengan peneliti, informan tersebut bersedia untuk diwawancarai. Informan tersebut merupakan Ketua Pemuda di Desa Tuapejat yang bernama Adrian dan peneliti langsung melakukan wawancara dengan Bapak Adrian.

Malam harinya sekitar pukul 21.00 peneliti mendatangi rumah salah satu petinggi relawan yang telah diberitahu oleh informan Bapak Adrian sebelumnya

dan ditemani oleh Bapak Berdani. Sesampainya di rumah informan tersebut peneliti melakukan pengenalan dan maksud dari kedatangan peneliti ke rumahnya. Beliau pun bersedia untuk diwawancara, pada 21.15 wib peneliti melakukan wawancara dengan informan tersebut. Informan tersebut bernama Jonar Tomba yang beralamat di Dusun Turonia, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Tomba kurang lebih 1 jam. Pada jam 10.30 peneliti pamit untuk pulang karena wawancara dengan informan telah selesai dan hari sudah malam.

Keesokan harinya 1 Mei 2021 peneliti menuju rumah Kepala Desa Tuapejat Bapak Pusuibiat T. Oinan yang berada di Dusun Mapadegat. Sesampainya peneliti di sana peneliti langsung mengenalkan diri dan menyebutkan dari maksud tujuan peneliti datang, lalu Bapak Pusuibiat bersedia untuk diwawancara dan wawancara berlangsung selama tiga puluh menit. Sesudahnya wawancara dengan Bapak Pusuibiat peneliti langsung ke rumahnya ketua DPC partai PDIP, tetapi sesampainya disana ketua DPC partai PDIP tidak berada di rumahnya dan peneliti diberitahu bahwa beliau sedang berada di Jakarta. Pada tanggal 3 Mei 2021 peneliti memutuskan untuk pulang sambil menunggu kabar dari ketua DPC partai PDIP.

Tanggal 4 Agustus 2021 peneliti melakukan wawancara dengan ketua DPC partai PDIP via whatsapp, sebelumnya peneliti diberi tahu bahwa informan baru saja terinfeksi virus corona sebelumnya. Karena hal tersebut wawancara dilakukan via whatsapp dan waktu wawancara sekitar kurang lebih 1 jam.

Tanggal 21 Oktober 2021 pukul 11.00 peneliti bertemu dengan Bapak Asrinaldi di hotel Mercure untuk melakukan wawancara triangulasi dengan data yang telah peneliti dapatkan sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Asrinaldi sekitar tiga puluh menit, setelah wawancara peneliti diberi masukan terhadap data yang telah peneliti dapatkan dan peneliti pamit untuk pulang. Pada 31 Oktober 2021 peneliti kembali ke Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk melakukan wawancara triangulasi ke KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tanggal 4 November 2021 peneliti mendatangi kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk melakukan wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Setelah wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai peneliti pergi ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 8 November 2021 untuk mewawancarai ketua Bawaslu Perius Sabaggalet. Setelah selesai wawancara dengan ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai peneliti membandingkan data yang sudah peneliti dapatkan di lapangan dan data yang peneliti peroleh dari informan triangulasi.

Tanggal 22 Juni 2022 peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk mencari tambahan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Pada malam harinya sekitar jam 20.00, peneliti mendatangi rumah informan dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ijonti Taileleu yang menjabat sebagai sekretaris di Partai Perindo untuk melakukan wawancara. Keesokan harinya tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 20.00 peneliti datang ke rumah informan yaitu M. Syahrul untuk melakukan wawancara yang mana beliau adalah pengurus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan

jabatan sebagai Ketua DPC. Hari selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 15.00 peneliti melakukan wawancara dengan ketua Dewan Pimpinan Daerah partai Nasdem periode 2014-2020 Nikanor Saguruk, S.Th. M.Si, yang sekarang menjabat sebagai ketua bidang pemenangan partai Nasdem 2021-2024. Selama wawancara peneliti menghabiskan waktu sekitar 40 menit untuk mewancarai beliau.

3.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi/lembaga, maupun wilayah sesuai dengan fokus permasalahan penelitian.³⁰ Untuk penelitian kali ini peneliti memilih lembaga sebagai unit analisis. Lembaga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dan terlibat dalam permasalahan penelitian ini. Lembaga yang penulis jadikan sebagai informan dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh baik dari masyarakat, pemberitaan di media cetak dan online atau fakta-fakta yang menunjukkan bahwa informan memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan.

3.5 Teknik Pemilihan Informan

Informan dalam penelitian kualitatif adalah individu yang dapat memberikan informasi serta data kepada peneliti. Untuk penetapan informan, digunakan strategi tertentu untuk mempermudah analisis dalam menyalurkan sebanyak mungkin data yang dapat diperoleh dari berbagai sumber dan mencoba menyelidiki data yang menjadi alasan penyusunan laporan penelitian. Dalam

³⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

penelitian ini, informan diambil dengan pertimbangan tertentu atau disebut dengan teknik *purposive sampling*.³¹

Spradley mengatakan di dalam Burhan Bungin, ada lima patokan untuk memilih informan atau narasumber, terdiri dari:³²

1. Individu yang sudah cukup lama terlibat dalam kajian dan serius atau yang menjadi narasumber, juga mengalaminya secara sungguh-sungguh karena kontribusinya dan sudah cukup lama terlibat dengan lingkungan atau kegiatan. Biasanya digambarkan dengan kemampuannya untuk memberikan data tentang sesuatu yang diungkapkan.
2. Individu yang sepenuhnya dan efektif terlibat dengan lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian penulis atau peneliti. Orang-orang yang saat ini tidak dinamis biasanya memiliki data yang terbatas dan akurat, kecuali jika mereka perlu mengungkap data tentang pengalaman mereka.
3. Individu yang memiliki banyak waktu atau kesempatan untuk wawancara.
4. Individu yang memberikan data atau informasi apa adanya dan tidak diatur terlebih dahulu.
5. Individu penelitian masih "asing" dengan penelitian, sehingga peneliti merasa lebih diuji untuk belajar sebanyak yang bisa diharapkan dan subjek adalah guru baru untuk peneliti.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 85

³² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm 69

Ada 2 macam tipe informan dalam penelitian, yang pertama informan penelitian yang bersifat pengamat, dan kedua informan yang bersifat pelaku. Informan penelitian dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih individu tertentu dengan mempertimbangkan data yang diperlukan, dengan maksud bahwa sebelum penelitian dilakukan, peneliti telah menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh individu tersebut, yang mungkin menjadi sumber data. Standar yang ditetapkan bersifat relatif, bergantung pada kebutuhan dan sasaran penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti serta memiliki informasi dan pemahaman tentang apa saja yang menjadi faktor kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Tabel 3.1
Kriteria Informan Penelitian

No	Kriteria
1.	Orang yang memiliki informasi mengenai kemenangan Joko Widodo dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai
2.	Orang yang terlibat dan berperan secara langsung terhadap kemenangan Joko Widodo pada pemilu presiden 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai
3.	Informan merupakan orang yang kredibel untuk diwawancarai mengenai kemenangan Joko Widodo pada pemilu presiden 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Berdasarkan kriteria diatas, maka dalam penelitian ini penulis memutuskan beberapa informan peneliti untuk mencari data sesuai dengan subjek yang digunakan peneliti:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Nama/Kriteria	Jabatan	Alasan
1.	Jonar Tomba	- Relawan pasangan 01 untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai - Kepala Dusun Turonia	Merupakan aktor yang melakukan strategi politik melalui kampanye politik yang digunakan
2.	Adrian	- Relawan untuk pasangan 01 - Ketua Pemuda Desa Tuapejat	Orang yang turun langsung ke masyarakat untuk melakukan kampanye
3.	Pusuibiat T. Oinan	- Kepala Desa Tuapejat	Karena sebagai pemimpin di Desa Tuapejat, dan setiap kegiatan yang ada di Desa Tuapejat harus sesuai izin dan kesepakatan Kepala Desa
4.	Berdani	- Kepala Dusun Karoniet	Salah satu tokoh masyarakat di Dusun Karoniet
5.	Alexander Saogo	- Kepala Dusun Mapadegat	Orang yang disegani dan juga salah satu tokoh masyarakat di Dusun Mapadegat
6.	Ibrani Sababalat	- Ketua DPC Partai PDIP Kabupaten Kepulauan Mentawai	Ketua DPC mengetahui semua aktivitas yang dilakukan oleh anggota partai, terkait dengan aktivitas kampanye.
7.	Ijonti Taileleu	- Sekretaris Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Mentawai	Partai koalisi untuk Partai PDIP pada Pemilu 2019.
8.	M. Syahrul	- Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Kepulauan Mentawai	Partai koalisi untuk Partai PDIP pada Pemilu 2019.
9.	Nikanor Saguruk S, Th. M.Si	- Ketua DPD Partai Nasdem periode 2014 – 2020	Partai koalisi untuk Partai PDIP pada Pemilu 2019.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh dalam memperoleh data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling tepat dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

a. Wawancara

Tujuan dari wawancara dalam penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam bagaimana politik identitas dalam kemenangan Joko Widodo pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Serta mengumpulkan keterangan dan informasi sebanyak-banyaknya dari informan dengan teknik wawancara secara mendalam (*indepth interview*) sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dengan model wawancara terstruktur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data penelitian, dengan memakai teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan. Metode dokumentasi³³

3.7 Uji Pembuktian (Triangulasi Data)

Triangulasi data adalah suatu prosedur yang digunakan untuk benar-benar melihat keabsahan informasi dengan menggunakan beberapa pilihan yang berbeda

³³ Sifat utama dari data yang akan dihasilkan melalui metode ini tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu lampau. (Burhan, Hlm. 125)

dari informasi yang sebenarnya, serta berkenaan dengan benar-benar melihat tujuan atau sebagai pemeriksaan terhadap informasi data tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan cara:

- a. Membandingkan informasi atau data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan individu di khalayak umum dan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Lihat apa yang orang katakan tentang situasi penelitian dengan apa yang mereka katakan dalam jangka panjang.
- d. Membandingkan keadaan dan sudut pandang seorang individu dengan perspektif yang berbeda pada individu, misalnya, individu biasa, individu kaya, individu pemerintah.
- e. Membandingkan hasil wawancara dan dokumen yang terhubung.³⁴

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan diatas, maka peneliti memutuskan beberapa orang yang memiliki posisi sebagai informan triangulasi data pada penelitian ini.

³⁴ *Op.cit*, Burhan Bungin, Hlm 69.

Tabel 3.3

Triangulasi Data		
No	Nama	Jabatan
1.	Asrinaldi	Pengamat politik
2.	Eki Butman	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai
3.	Perius Sabaggalet	Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah cara paling umum untuk memperbaiki informasi menjadi struktur yang lebih mudah dan tidak sulit, proses penataan ulang informasi terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman dan catatan sebagai laporan dengan mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan informasi sehingga tidak sulit untuk diuraikan dan mudah untuk dipahami.³⁵

Tahapan-tahapan dalam proses analisis data secara umum adalah:

- a. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai sebuah konsistensi.
- b. Dilanjutkan dengan langkah-langkah abstraksi teoritis terhadap informasi di lapangan dengan mempertimbangkan hasil pernyataan yang sangat memungkinkan.

³⁵K. Yin Robert, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 103.

- c. Semua data yang terkumpul dianalisis dengan menginterpretasikannya melalui perspektif etik (pandangan dan pengetahuan yang disampaikan subjek berupa pendapat atau informasi).
- d. Pada penulisan laporan hasil wawancara di lapangan, sebagaimana yang dituturkan informan kemudian dibahas, diinterpretasikan atau dianalisis oleh peneliti sesuai dengan pandangan dan pengetahuan peneliti (Analisis Emik).

3.9 Sistematika Penulisan

Untuk membuat penelitian ini lebih jelas dan mudah dipahami, maka dari itu penulisan penelitian ini disusun secara sistematis. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang peneliti gunakan:

- **Bab I:** Pendahuluan, termasuk landasan yang menjelaskan alasan peneliti untuk mengangkat penelitian pemanfaatan strategi politik yang terjadi dalam pemilihan presiden. Oleh karena itu, permasalahan tersebut dapat direncanakan bagaimana memanfaatkan strategi politik yang dilakukan Joko Widodo dalam pemilihan umum yang dianggap menyebabkan kemenangan pemilu presiden tahun 2019, termasuk tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
- **Bab II:** Tinjauan pustaka, yang berisi penelitian yang relevan untuk penelitian ini, perspektif atau ide yang digunakan sebanding dengan penelitian dan skema pemikiran. Dalam penelitian ini teori politik identitas yang digunakan.

- **Bab III:** Metodologi penelitian, pada bagian ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, peranan peneliti, teknik atau metode pemilihan informan, unit analisis, teknik pengumpulan informasi data, uji keabsahan data, pemeriksaan informasi, dan rancangan struktur penelitian.
- **Bab IV:** Berisi klarifikasi wilayah/objek penelitian, untuk memberikan gambaran wilayah penelitian dan digunakan untuk membantu klarifikasi masalah yang sedang diteliti. Bab ini merupakan garis besar wilayah lokasi penelitian, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- **Bab V:** Analisis data dan pembicaraan informasi, memperkenalkan penemuan-penemuan di lapangan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan politik identitas. Jadi bisa diambil kesimpulan dari penelitian ini.
- **Bab VI:** Bagian bab ini berisi suguhan terakhir penyusunan skripsi, yaitu kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan hasil dari pemahaman dan analisis dengan cara ilmiah atas semua yang telah dilakukan peneliti selama proses penelitian lapangan. Bagian ini juga akan berkontribusi sebagai saran baik itu secara akademis maupun praktis.